

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pelaksanaan demokrasi di negara-negara asia tenggara belum secara komprehensif terlaksana dengan baik, terdapat negara dengan tingkat pelaksanaan demokrasi yang meningkat dan terdapat negara dengan pelaksanaan demokrasi yang stagnan bahkan mengalami penurunan, salah satu indikator dari demokrasi adalah pelaksanaan sebuah pemilihan umum. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimulai sejak peristiwa reformasi 1998 yang merombak tatanan kehidupan demokrasi di Indonesia, yaitu terlaksananya pemilihan umum dengan partisipasi warga negara baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dengan skala pemilu legislatif maupun pemilihan presiden (Putri N. E., 2017).

Pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali menjadi momentum pergantian kekuasaan sehingga dalam prosesnya terjadi kontestasi selama periode kampanye. Beragam strategi dan manuver dilakukan oleh setiap pasangan calon untuk memenangkan kontestasi tersebut seperti pemasangan baliho, blusukan ke daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi suara hingga mensegmentasi media dengan tujuan mengkokohkan sosok yang akan memimpin dalam masa jabatan selanjutnya. Hal tersebut menyebabkan hingar-bingar informasi yang diterima oleh warga sehingga proses literasi politik secara tidak sadar telah berlangsung. Sehingga proses membaca dan menelaah setiap informasi yang disebarakan merupakan hal yang sangat fundamental.

Namun, dikutip dalam Indeks Alibaca Indonesia tingkat literasi masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah (Pusparisa, 2020). Hal tersebut menimbulkan efek domino yang kemudian juga berdampak pada literasi politik masyarakat Indonesia, sehingga dalam proses pelaksanaan pemilihan umum dalam periode kampanye marak terjadi *Black Campaign* dan *Money Politic*. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan literasi masyarakat, antara lain: mengintegrasikan perpustakaan disetiap daerah, gerakan posyandu, program membaca siswa, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi elektronik (Dinda, 2019).

Literasi politik menurut Crick (dalam Heryanto, 2019) merupakan usaha warga dalam memahami informasi seputar politik, apa program kontestan dan bagaimana kecenderungan kontestan untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku *voters*. Kemudian Crick melanjutkan bahwa cakupan literasi politik tidak hanya sebatas pengetahuan, melainkan tentang bagaimana keefektifan serta sikap partisipatif warga untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara sukarela atau dalam keadaan formal. Sehingga literasi politik mengandung senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap (Heryanto, 2019).

Literasi politik memiliki muatan pokok: partisipasi politik dan pemahaman kritis warga atas hal-hal pokok terkait politik. Konsep partisipasi politik berdasar pada prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat dengan pelaksanaan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui dewan perwakilan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik

demokrasi memiliki tanggungjawab untuk menumbuhkan partisipasi warga negaranya, agar terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan menumbuhkan pembangunan yang lebih maju pada aspek lain (Fatmarina, Rini, & PS, 2019).

Dalam konteks pemilihan umum, literasi politik memiliki makna sebagai kemampuan warga dalam menelaah informasi dengan substansi politik terutama perihal pemilihan umum. Memiliki pengetahuan untuk mengakses informasi seputar calon pemimpin, membandingkan dan mengevaluasi berbagai informasi, kemudian mampu mengorganisasikan serta membuat kesimpulan pemimpin yang akan diberikan mandat jabatan oleh mereka (Putri T. I., 2014). Selama proses terbangunnya literasi politik tersebut diharapkan warga dapat berpartisipasi secara aktif dalam rangka pemilihan umum. Dalam hal ini, naik turunnya tingkat partisipasi politik berbading lurus dengan literasi politik (Putri N. E., 2015).

Dikutip dalam situs kantor staf presiden, tingkat partisipasi pemilih mengalami tren penurunan dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan presiden pasca reformasi. Tercatat pada pemilu 1999, pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 92,6% dan total pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) sebanyak 7,3%. Tingkat partisipasi dalam pemilu 1999 masih tergolong tinggi, hal tersebut disebabkan oleh tingginya harapan masyarakat Indonesia setelah peristiwa reformasi 1998 yang mengharapakan perubahan setelah menggunakan hak suaranya. Lalu pada pemilu 2004, angka partisipasi pemilih mengalami penurunan yang memprihatikan. Tercatat pemilih yang menggunakan hak suaranya turun hingga 76,6% dan terhitung jumlah pemilih

yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 23,4% setelah dilakukan pemilihan presiden putaran kedua. Tren penurunan jumlah partisipasi dalam pemilihan tersebut berlanjut pada pemilu 2009, yang mencatat pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 71,7% dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 28,3%. Lalu pada pemilu 2014, tercatat tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya sebanyak 69,58 dan pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya sebanyak 30,42% (Sulistyo, 2019).

Kemudian dikutip dalam situs [mediaindonesia](#), tingkat partisipasi pelaksanaan pemilu pemilihan presiden 2019 mengalami peningkatan. Pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 81,97%, tingkat partisipasi tersebut melampaui target nasional 77,5% (Jelita, 2019). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilu 2019 disebabkan oleh tiga faktor yaitu: (1) Peran media sosial yang membentuk opini masyarakat agar menggunakan hak suaranya dalam pemilu; (2) Tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik; dan (3) Daya pikat pasangan calon presiden dan wakil presiden bagi kalangan milenial (Mulyadi, 2019).

Peran kunci dari ketiga faktor tersebut adalah teknologi komunikasi media sosial sebagai bentuk media baru yang secara keseluruhan mampu mengarahkan dan membentuk opini masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran berdemokrasi melalui perluasan ruang publik yang membuka akses untuk terbukanya ruang interaksi sehingga sikap politik yang rasional dan kritis warga dapat terbentuk. Hal ini sejalan dengan cara untuk meningkatkan literasi

masyarakat yaitu memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi elektronik.

Teknologi komunikasi menurut Rogers (dalam Wahid, 2018) merupakan perangkat yang memiliki fungsi untuk mengkondisikan penggunaannya sebagai individu dalam mengolah pesan, beradaptasi dengan standar penggunaan teknologi komunikasi serta keterjalinan interaksi dengan individu lain tanpa adanya hambatan atau jarak. Media sosial sebagai salah satu bentuk media baru menjadi sebuah *tools* yang efisien dalam proses membangun literasi politik, masyarakat dapat mengkonsumsi informasi sekaligus memproduksi informasi sehingga terbangun ruang publik. Menurut Habermas (dalam Kadarsih, 2008), ruang publik merupakan akses warga negara dalam mendeliberasikan segala informasi yang menjadi kepentingan bersama. Dalam konteks negara, ruang publik dirancang untuk menjadi ruang mediasi antara masyarakat dengan negara.

Perkembangan teknologi komunikasi tersebut berimbas pada perubahan perilaku politik para pemilih. McLuhan (dalam Iswandi & Efendi, 2019) menyatakan bahwa inovasi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Kemudian dilanjutkan oleh Gumilar (dalam Iswandi & Efendi, 2019) bahwa kehadiran media baru yang berbasis daring dengan fitur *like*, *trending topic*, *hashtag*, *share* menjadikan informasi dapat disampaikan dalam jangka waktu yang singkat dengan penyebaran informasi yang massif dan menjadi pusat atensi dunia maya (*viral*)

yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi pada masyarakat lain (Iswandi & Efendi, 2019).

Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu pemilihan presiden tahun 2019 meningkat dengan total suara mencapai 81,97%. Menandakan ruang publik kembali aktif sehingga masyarakat sebagai warga negara dapat menegaskan eksistensi diri dengan memperjuangkan pemenuhan hak-haknya dan mendesak agar kepentingannya dapat terakomodasi, oleh karena itu masyarakat menggunakan hak pilihnya (Muthhar, 2018). Dengan kehadiran media sosial sebagai bentuk media baru menjadikan ruang publik dapat dimanfaatkan secara efisien sebagai sumber penyedia informasi dalam membentuk opini serta meningkatkan kesadaran berdemokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dengan memanfaatkan koneksi jaringan internet, media sosial dapat menjadi alternatif ruang publik dengan saluran transformasi informasi yang efisien. Tercatat dalam survei pengguna internet tahun 2018 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terdapat 171,17 juta jiwa sebagai pengguna internet dari total populasi penduduk di Indonesia sebanyak 264,16 juta jiwa (APJII, 2018). Kemudian dikutip dalam situs datareportal yang melakukan survei pengguna internet secara global tahun 2020, tercatat pengguna internet di Indonesia sebanyak 175,4 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 272,1 juta jiwa (Kemp, 2020). Artinya jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga potensi media sosial untuk digunakan sebagai sumber

penyedia informasi oleh pemilih dalam kerangka literasi politik serta sebagai media komunikasi politik antara masyarakat dengan pemerintah menjadi sangat strategis.

Dalam laporan penelitian dengan judul “*Kehadiran Media Baru Dalam Proses Komunikasi Politik*” menjelaskan bahwa konektivitas internet membuat proses komunikasi politik dapat berjalan dengan sangat efisien dan fleksibel. Kehadiran media baru dapat menginisiasi ruang publik secara lebih bebas melalui ruang-ruang virtual dalam media sosial sehingga komunikasi politik dapat terlaksana (Indrawan, Efriza, & Ilmar, 2019). Kemudian dalam laporan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pesan Politik di Media Sosial terhadap Peningkatan Literasi Politik Generasi Milenial*”, ditemukan bahwa penggunaan media sosial dalam mengantarkan pesan politik memiliki pengaruh sebesar 77,5% terhadap peningkatan literasi politik generasi milenial (Rosadi, Darmawan, & Anggraeni, 2020).

Instagram menjadi salah satu *platform* media sosial dengan jumlah pengguna yang terus bertambah. Dilansir pada data yang dirilis napoleoncat.com, hingga periode Juli 2021 pengguna *Instagram* di Indonesia mencapai 91.770.000 juta pengguna. Dengan didominasi oleh pengguna golongan usia pemilih pemula yaitu 18-24 tahun sebanyak 36%, menjadikan *platform Instagram* memiliki andil yang cukup besar dalam memberikan stimulus informasi di kehidupan sehari-hari. Akun Generasi Melek Politik (@*generasimelekp politik*) merupakan salah satu akun *Instagram* dengan konten edukatif seputar dunia politik Indonesia dengan jargon “*Providing informal*

political education for the youth in a fun way” dan secara terbuka menggagas akun ini independen dan tidak terafiliasi dengan berbagai institusi, sehingga konten yang disajikan dalam akun bersifat objektif dalam menyampaikan informasi. Sesuai dengan *username*-nya, akun ini menyajikan konten edukatif seputar dunia politik dengan tujuan agar generasi pengguna *Instagram* dapat melek politik, informasi dikemas dengan konten yang menarik serta berbobot. Selain bergerak dalam dunia maya, generasi melek politik juga bergerak di dunia nyata melalui berbagai diskusi, seminar, *talkshow*, dan webinar.

Terhitung sejak Juli 2021, akun *Instagram* @generasimelekpoltik telah memiliki 14 ribu pengikut di *Instagram* dan telah memproduksi konten sebanyak 613. Konten yang diproduksi pada profil mengulas tentang hal-hal edukatif yang berkaitan dengan kehidupan bernegara di Indonesia khususnya pada kehidupan politik seperti: pelaksanaan pilkada, pro kontra undang-undang cipta kerja, serta mengulas tentang informasi-informasi edukatif seputar politik lainnya. Contoh kontennya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1

Konten Instagram

Sumber: Instagram @generasimelekpoltik



Gambar 1. 2

Konten Instagram

Sumber: Instagram @generasimelekpoltik

Pada konten tersebut, diilustrasikan bagan sistem politik menurut David Easton tentang bagaimana alur sebuah kebijakan terbentuk, mulai dari input sampai dengan output. Kemudian diberikan contoh studi kasus tentang pemberlakuan pajak kepada layanan *streaming online* Netflix sehingga informasi yang disampaikan mengenai proses sebuah kebijakan terbentuk melalui skema sistem politik menurut David Easton dapat tergambar oleh pengikut akun @generasimelekp politik. Selain penyajian informasi melalui konten juga terdapat program *digital townhall meeting* bertajuk TEMU KANDIDAT yaitu sebuah program sebagai penyambung aspirasi antara pemuda dengan kandidat pemimpin daerah terkait untuk mendorong kebijakan pro-lingkungan sesuai kebutuhan serta aspirasi warga setempat. Berikut contoh poster kegiatannya:



Gambar 1. 3 Poster Kegiatan Temu Kandidat Gorontalo
Sumber: Instagram @generasimelekp politik

Program *Digital townhall meeting* ini telah dilaksanakan secara daring di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia, antara lain: Sulawesi Tengah,

Kalimantan Barat, Gorontalo, Kabupaten Siak, Kabupaten Sintang. Selain mengundang para kandidat pemimpin daerah, program ini juga mengundang para pemuda setempat untuk turut berpartisipasi menyuarakan isu-isu penting seputar wilayahnya tersebut. Oleh karena itu, akun *Instagram* @generasimelekpoleitik dapat menjadi salah satu *platform* utama dalam memberikan stimulus informasi seputar literasi politik, dimana pengguna dapat mengikuti dan akan mendapatkan informasi seputar politik yang disajikan dalam baik melalui konten *Instagram* yang menarik atau melalui diskusi, seminar, *talkshow* dan webinar.

Fenomena penggunaan media sosial dalam meningkatkan literasi politik pada aspek partisipasi politik dalam konteks pemilu pemilihan presiden 2019, menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian dengan fokus pada pemaknaan literasi politik bagi pengikut *Instagram* @generasimelekpoleitik melalui konten yang dibagikan dalam kerangka literasi politik sehingga pada proses berlangsungnya pemilihan umum baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah yang akan datang, literasi politik dalam media sosial dapat lebih dioptimalkan. Dari latar belakang inilah maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Literasi Politik dalam Media Sosial (Studi Fenomenologi Pengikut akun *Instagram* @generasimelekpoleitik dalam Kerangka Literasi Politik)”.

B. Masalah Penelitian

Berdasar pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah “Bagaimana media sosial *Instagram* memberikan literasi politik bagi para pengguna media sosial”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada tindakan akun *Instagram* @generasimelekp politik dalam pendekatan literasi politik.

2. Sub Fokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah pemahaman literasi politik bagi pengikut akun *Instagram* @generasimelekp politik yang telah mengikuti pelaksanaan kegiatan *digital townhall meeting* temu kandidat serta melalui konten yang dibagikan dalam kerangka literasi politik.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah akun *Instagram* @generasimelekp politik telah melakukan penyajian konten sesuai tindakan yang menjadi fokus dalam pendekatan literasi politik?
2. Bagaimana pemahaman literasi politik pengikut akun *Instagram* @generasimelekp politik?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan telaah lebih lanjut mengenai bagaimana penyajian konten untuk menggiatkan aktivitas literasi politik dalam kerangka pendekatan literasi politik melalui media sosial khususnya pada akun

Instagram @generasimelekp politik. Serta pemahaman literasi politik pengguna media sosial khususnya pengikut akun *Instagram @generasimelekp politik* melalui penyajian konten maupun kegiatan yang diadakan oleh akun *Instagram @generasimelekp politik*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

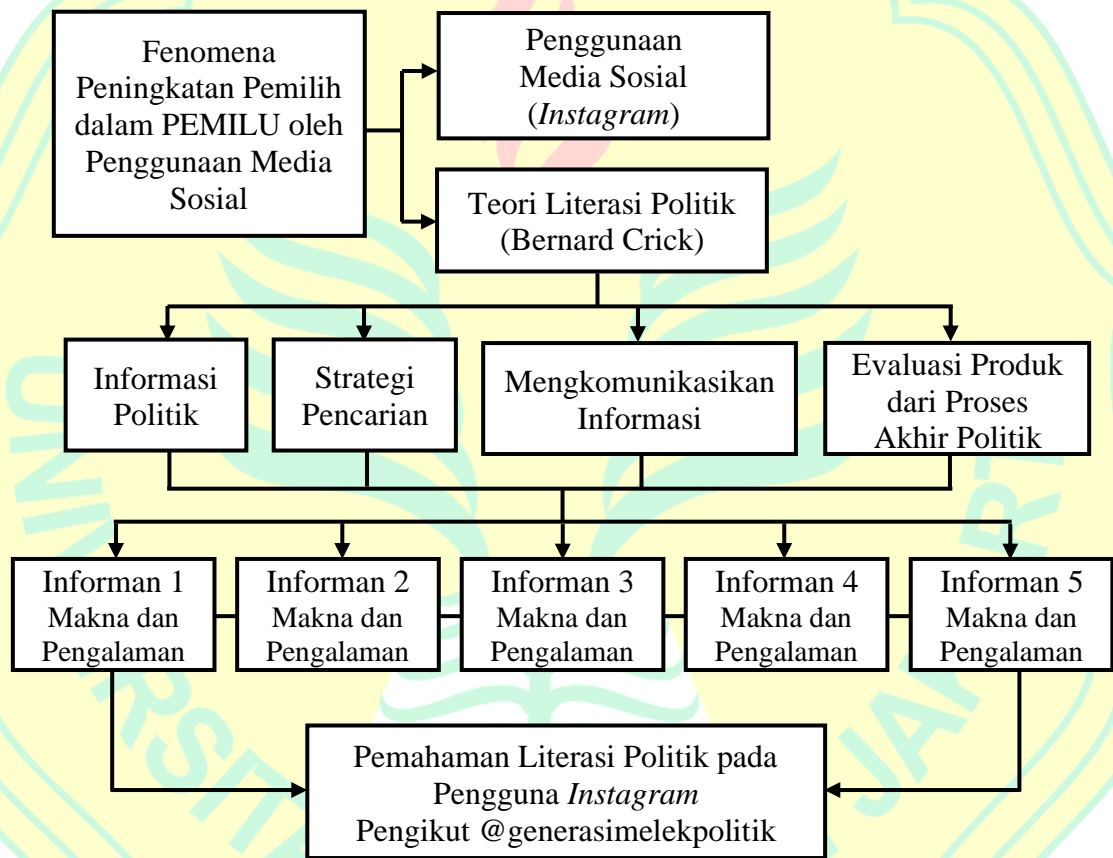
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan memperluas wawasan khususnya pada kajian literasi politik dalam media sosial *Instagram* dan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang sangat menarik untuk dilakukan pengembangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembaca, memberi informasi mengenai literasi politik dalam media sosial. Selain itu, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang akun yang memiliki dampak yang positif terhadap pengetahuan sehingga dapat lebih bijak dalam mengikuti arus informasi yang ada pada media sosial.
- b. Peneliti, mampu memberikan telaah mengenai literasi politik dalam media sosial *Instagram*, menghargai pemaknaan literasi politik bagi setiap pengguna *Instagram* serta lebih teliti dalam menganalisis sebuah data dan informasi.
- c. Subjek, memberi dorongan agar senantiasa mengembangkan wawasan dan terus menambah kapasitas agar dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan sekitar mengenai literasi politik.

- d. Tempat penelitian, memberi stimulus terhadap keberlangsungan akun-akun yang memiliki tujuan yang positif dalam memberikan informasi dalam media sosial. Selain itu, agar akun yang serupa @generasimelekipolitik senantiasa menebarkan manfaat agar terciptanya situasi masyarakat Indonesia yang melek politik.

G. Kerangka Konseptual



Bagan 1. 1
Kerangka Konseptual